

Marcellino Satrio Putro M

2021320010

Sistem Informasi

Pertanyaan

1. bagaimana analisa anda dalam perjalanan praktek Pancasila dalam arus sejarah bangsa ? berikan argumen berdasarkan pendapat ahli Hukum tata negara minimal 2 ahli dan berikan simpulanmu berdasarkan pendapat ahli.
2. dalam perjalanannya Pancasila mengalami praktek yang berubah2 pada setiap periode pemerintahan, berikan analisa anda untuk hal tersebut
3. bagaimana analisa anda tentang Rumusan Pancasila pada Piagam Djakarta

Jawaban

1. Analisis mengenai perjalanan praktek Pancasila dalam arus sejarah bangsa:

a) Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Pertama:

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, seorang ahli Hukum Tata Negara Indonesia, menyatakan bahwa dalam sejarah bangsa Indonesia, praktek Pancasila tidak selalu konsisten dan sempurna. Ia menyoroti beberapa momen di mana nilai-nilai Pancasila mengalami tantangan dan perubahan, seperti saat masa Orde Baru di bawah rezim Soeharto. Pada masa tersebut, terjadi pembatasan kebebasan berpendapat dan ekspresi, serta pelanggaran hak asasi manusia yang berujung pada penindasan terhadap oposisi politik. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia.

b) Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Kedua:

Prof. Dr. Yusril Ilha Mahendra, juga seorang ahli Hukum Tata Negara Indonesia, berpendapat bahwa meskipun Pancasila pernah mengalami tantangan dan praktek yang bervariasi pada setiap periode pemerintahan, nilai-nilai dasar Pancasila tetap relevan dan mengikat untuk menjadi pedoman berbangsa dan bernegara. Ia menekankan bahwa perubahan pemerintahan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun penting bagi bangsa Indonesia untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar Pancasila agar tetap berjalan pada jalur yang baik.

Simpulan:

Dari pendapat kedua ahli Hukum Tata Negara di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia memang tidak selalu konsisten dan mengalami perubahan pada setiap periode pemerintahan. Hal ini dapat dipahami karena Indonesia mengalami berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi interpretasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Namun,

nilai-nilai dasar Pancasila tetap relevan sebagai fondasi negara dan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk tetap memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan persatuan.

2. Analisis mengenai perubahan praktek Pancasila pada setiap periode pemerintahan:

Perubahan praktek Pancasila pada setiap periode pemerintahan bisa disebabkan oleh beberapa faktor:

- a) Konteks Sosial dan Politik: Perubahan praktek Pancasila seringkali terjadi sebagai respons terhadap kondisi sosial dan politik yang berubah dari waktu ke waktu. Periode pemerintahan yang berbeda-beda memiliki prioritas dan tujuan yang berbeda dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi.
- b) Pemimpin dan Ideologi: Pemimpin politik dan ideologi yang mendominasi periode tertentu dapat mempengaruhi cara praktek Pancasila. Pemimpin dengan visi dan pandangan politik yang berbeda dapat mengubah penekanan dan interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila.
- c) Perkembangan Masyarakat: Masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan dalam nilai, norma, dan tuntutan yang berkembang seiring waktu. Perubahan ini dapat mempengaruhi bagaimana Pancasila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
- d) Dinamika Partai Politik: Partai politik yang berkuasa atau berperan dalam suatu periode pemerintahan juga dapat mempengaruhi implementasi Pancasila sesuai dengan orientasi politik mereka.

3. Analisis mengenai Rumusan Pancasila pada Piagam Djakarta:

Piagam Djakarta merupakan dokumen penting yang menyusun rumusan awal Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan yang dipimpin oleh Mr. Soepomo menetapkan Piagam Djakarta sebagai naskah dasar perumusan Pancasila. Isi Piagam Djakarta mencakup empat sila, yaitu:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Analisis terhadap Piagam Djakarta menunjukkan bahwa rumusan awal Pancasila lebih eksplisit mengandung aspek keagamaan, seperti kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, rumusan ini kemudian mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945 saat Mr. Soepomo menyatakan naskah dasar baru yang berisi lima sila, dengan menggantikan sila "Kerakyatan" dengan "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia serta menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai prinsip fundamental negara.

Perubahan rumusan Pancasila tersebut menggambarkan dinamika dan proses perenungan mendalam yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dalam menyusun ideologi negara. Pancasila akhirnya diakui dan dijadikan sebagai dasar negara Indonesia dan menjadi landasan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam persatuan dan kesatuan.